

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI PROVINSI BALI (STUDI PADA PARTAI PDIP, DEMOKRAT DAN PSI)

Komang Eva Oktapiani¹⁾, Bandiyah²⁾, Mirah Mahaswari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: evaoktapiani@gmail.com, bandiyah@fisip.unud.ac.id², mirahmahaswari@gmail.com³

ABSTRACT

The preparation of this research aims to provide overview of women empowerment in PDIP, Demokrat and PSI parties in Bali Province. This research uses Liberal Feminism theory from David Marsh and Gerry Stoker which declare there are struggles for women's right in various aspects and one those is political aspect. The method used is descriptive qualitative that explains the incident and phenomenon that occurs so get information that is in accordance with the fact and the real situation as well. The findings of this study is showing that the party has implemented several strategies to empowering women, but the implementation is not running optimally because the domination still strong and the public trust in men, it needs an understanding that women can also fight for the same rights.

Keywords: *Women's Empowerment, Political Parties, Bali Province*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji, karena melalui ranah tersebut perempuan dapat merepresentasikan aspirasinya. Kita mengetahui bahwa saat ini terdapat banyak kaum perempuan yang sudah memiliki kepedulian terhadap isu gender, kesejahteraan, pendidikan, maupun anti kekerasan. Namun kaum perempuan tidak akan bisa berjalan sendiri dalam menyalurkan aspirasi yang dimiliki tanpa adanya suatu wadah yang tepat. Wadah yang dimaksud dalam konteks ini adalah partai politik.

Melalui partai politik, kaum perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya secara nyata di segala bidang khususnya dalam bidang politik, sehingga partai politik menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan

partisipasi politik dan keterwakilan politik kaum perempuan.

Maka dapat dipahami bahwa di sinilah definisi suatu partai politik yang dianggap sebagai wadah yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Banyaknya partai politik yang bermunculan tidak menjamin tingginya angka keterwakilan kaum perempuan dalam ranah politik, sehingga berimbang pada partai politik yang secara umum dijadikan sebagai kendaraan dalam mengikuti rangkaian pemilihan umum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partai politik di Indonesia masih belum siap dalam memberdayakan kader perempuan, terbukti dengan masih minimnya pula posisi perempuan dalam jabatan strategis di partai politik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan mengkaji pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi

Bali. Dari berbagai partai politik yang ada di Bali, penulis hanya memfokuskan penelitiannya terhadap ketiga partai karena PDIP yang merupakan partai besar nasionalis dominan di Bali dengan jumlah kader dan pendukung yang cukup banyak, Demokrat yang merupakan partai dengan terobosan terbarunya yakni menempatkan caleg perempuan melebihi kuota yang telah ditetapkan dan PSI merupakan partai baru yang banyak menempatkan kaum milenial dan perempuan untuk menjadi kader partainya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Feminisme Liberal

Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal dari David Marsh dan Gerry Stoker yang merupakan paham yang dibangun secara kritis atas pemikiran liberal, penekanan individu, rasionalitas, serta diperbarunya suatu institusi dan yang diperjuangkan adalah hak-hak kaum perempuan, baik dalam politik (suara pemilu), ekonomi maupun pendidikan. Teori ini lebih menekankan pada terciptanya suatu kebebasan dan kesetaraan yang bersifat rasionalitas. Perempuan dan laki-laki merupakan makhluk yang rasional sehingga dianggap memiliki kemampuan dan hak yang sama.

Permasalahan yang sering terjadi selama ini terletak pada kebijakan negara yang dianggap bias gender. Hal tersebut juga dikarenakan masih kuatnya maskulinitas di lembaga negara dan partai politik yang mengakibatkan terbelenggunya hak-hak kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi yang berakar dari tidak adanya hak sipil serta peluang

pendidikan yang sama bagi perempuan. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menghambat akses perempuan dalam memperoleh kekuasaan maupun sebagai pembuat keputusan. Dengan adanya feminisme liberal diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan yang mendasar bagi kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi pemenuhan hak-hak sipil perempuan, sehingga keberadaannya menjadi setara dengan kaum laki-laki serta posisi kaum perempuan tidak lagi termarginalkan dalam segala aspek khususnya aspek politis.

Oleh karena itu, kaum feminis liberal tertarik dalam meningkatkan status perempuan di seluruh dunia sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik serta mendapatkan akses pada kekuasaan yang setara dengan laki-laki.

Konsep Partai Politik

Secara umum partai politik merupakan sarana yang dapat digunakan oleh warga negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan negara. Dengan kata lain, salah satu cara masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik adalah dengan ikut bergabung ke dalam partai politik sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kritik serta saran yang dapat ditujukan kepada pemerintah. Kondisi partai yang cenderung menjadikan perempuan sebagai kaum yang termarginalkan membuat oligarki semakin tumbuh subur dan mematahkan semangat perempuan dalam menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesetaraan melalui pemberdayaan

perempuan dalam partai politik yang dapat diwujudkan melalui strategi partai dalam memperjuangkan hak perempuan.

Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik

Saat ini kaum perempuan sangat penting untuk diberdayakan karena banyak yang memiliki kepedulian terhadap isu gender. Dalam menyalurkan aspirasi yang dimiliki, maka diperlukan adanya suatu wadah yang tepat yakni partai politik. Berawal dari partai politik, perempuan dapat menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan yang selama ini dianggap bias gender. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai kemampuan atau cara suatu partai politik dalam menempatkan posisi perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Baik melalui reformasi hukum yang berlaku dalam partai, pembentukan divisi perempuan, peraturan internal partai maupun strategi yang ditawarkan pada perempuan ketika dihadapkan pada pemilihan umum.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018: 8), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan pada latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi Bali khususnya partai PDIP, Demokrat dan PSI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi Internal Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pemberdayaan perempuan dalam organisasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender dapat terlihat pada Anggaran Dasar partai Pasal 20 ayat 3 mengenai Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik serta Pasal 60 tentang keterwakilan perempuan. Sejauh ini, belum terdapat ketua DPD yang berasal dari kaum perempuan walaupun ketua DPP PDIP merupakan seorang perempuan. Divisi perempuan ada untuk mengatur tentang keperempuanan dengan berbagai masalah dan solusi yang tepat.

Partai Demokrat

Pemberdayaan perempuan dalam organisasi internal Partai Demokrat, khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender dapat terlihat pada keterlibatan partai dalam mengukung program-program yang mengedepankan perempuan. Pada akhirnya Demokrat juga memiliki organisasi sayap yang bernama Perempuan Demokrat Indonesia atau Srikandi Demokrat. Apabila tidak ada divisi perempuan dalam suatu partai, maka tidak akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran kaum perempuan, sehingga harus kaum perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Partai Solidaritas Indonesia

Pemberdayaan perempuan dalam organisasi internal PSI, khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender sudah dapat terlihat dalam Anggaran Dasar partai pada Bab XIII tentang Keterwakilan Perempuan Pasal 26. Walaupun PSI merupakan partai yang mayoritas perempuan, ini juga tidak menjamin bahwa perempuan akan dijadikan ketua dalam segala tingkatan kepengurusan. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang bergabung dalam partai meskipun sudah ada yang memenuhi masyarakat yang kerap dianggap belum mampu menjadi pemimpin dan minim pengalaman, apalagi perempuan yang masih muda.

Oleh karena itu, sebagai partai baru, khususnya di Bali diperlukan ketua yang sekiranya sudah dikenal oleh masyarakat luas, agar mereka percaya bahwa partai baru ini dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik pada Periode Pra Pemilihan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Keterlibatan partai dalam mendukung pemberdayaan perempuan pada periode pra pemilihan dapat terlihat dari proses rekrutmen yang memprioritaskan kaum perempuan. Pada pemilu legislatif tahun 2019, PDIP menempatkan perempuan pada urutan teratas di daerah pemilihannya, dengan harapan peluang terpilih yang lebih besar.

Dana kampanye diperoleh dari sistem gotong royong atau saling membantu antar anggota serta kader partai. Ketika berkampanye berbagai hambatan tentu dihadapi oleh kaum perempuan, salah satunya sulit mempercayai masyarakat bahwa perempuan mampu berkiprah dalam ranah politik, terlebih bagi pendatang baru. Oleh karena itu, dukungan partai terhadap calon legislatif perempuannya terlihat dari cara partai memberikan solusi terhadap hambatan tersebut.

Partai Demokrat

Keterlibatan partai dalam mendukung kaum perempuan pada periode pra pemilihan dapat terlihat dari proses rekrutmen yang mempermudah akses perempuan untuk menjadi calon legislatif. Sebagian besar dananya berasal dari dana pribadi dan dana yang diperoleh dari iuran keanggotaan internal partai. Selain itu, dukungan partai terhadap calon legislatif perempuannya juga dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan seperti menyediakan pelatihan atau pengembangan kepemimpinan sebelum memasuki masa kampanye.

Partai Solidaritas Indonesia

Keterlibatan partai dalam mendukung pemberdayaan perempuan pada periode pra pemilihan, khususnya dalam proses rekrutmen dapat terlihat dari strategi PSI dalam mengusung tema “tanpa mahar” ketika mengikuti pemilu legislatif. Selain itu partai juga melakukan penggalangan dana dari masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar dapat terlihat partai bertindak secara independen atau tidak dalam menjalankan

fungsi politiknya. Dukungan PSI ketika kader perempuannya mencalonkan diri juga dapat dibuktikan dengan penempatan nomor urut yang tidak didasarkan atas dana atau uang, melainkan dengan cara undian berupa kertas yang ditulis dan diambil secara acak oleh bakal calon. Hal ini dilakukan oleh partai PSI agar dapat menghasilkan calon yang mampu bersaing secara sportif.

Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik pada Periode Pasca Pemilihan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sebagai partai yang ingin meningkatkan kinerja kaum perempuan ketika terpilih menjadi anggota legislatif, PDIP memiliki strategi khusus untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan cara bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Bali dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali. Dukungan partai untuk perempuan tidak terpilih dapat terlihat ketika terdapat kegiatan yang diselenggarakan oleh partai, maka partai akan memprioritaskan perempuan yang tidak terpilih untuk menjadi panitia. Hal tersebut dilakukan, agar ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka akan lebih dikenal dan masyarakat juga dapat menilai kinerjanya seperti apa, sehingga tidak sulit mendapatkan suara masyarakat apabila mereka ingin mencalonkan diri kembali.

Partai Demokrat

Kaum perempuan terpilih dari Partai Demokrat diberikan pemahaman ketika

akan menjalin kerja sama dengan laki-laki. Selanjutnya, untuk tetap dapat merangkul perempuan yang tidak terpilih dalam ranah politik, Partai Demokrat memiliki strategi khusus yakni dengan cara bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW. Melalui BKOW, perempuan yang tidak terpilih ini dapat menyuarakan aspirasi dan melanjutkan perjuangannya meski tidak berada di parlemen.

Partai Solidaritas Indonesia

Sebagai partai baru, PSI akan tetap memberikan pelatihan dan pembekalan kepada anggota legislatif perempuan terpilih. Pelatihan tersebut berupa pelatihan *soft skill* seperti kepemimpinan maupun strategi ketika turun ke masyarakat yang dilakukan agar perempuan dapat memaksimalkan perannya di parlemen. Peran partai untuk dapat merangkul perempuan yang tidak terpilih, PSI melakukan beberapa hal seperti melibatkannya dalam setiap pengambilan keputusan internal partai, selanjutnya mengadakan pelatihan kepribadian mengenai cara *lobbying*, negosiasi dan kampanye agar kaum perempuan lebih memiliki daya saing, dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi dengan kawan atau lawan politiknya serta membangun citra diri serta mempromosikan dirinya kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Dalam organisasi internal sampai saat ini belum ada perempuan yang

berhasil menduduki kursi sebagai ketua umum di DPP karena PDIP memiliki kualifikasi yang tinggi ketika merekrut ketua umum, sedangkan efektivitas divisi pemberdayaan perempuan dapat terlihat dari terpilihnya enam dari sembilan perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPRD Provinsi Bali. Selanjutnya Partai Demokrat selalu memprioritaskan kaum perempuan dalam peraturan organisasinya, hal ini tidak menjamin banyaknya kaum perempuan yang dapat menduduki posisi ketua umum karena kepemimpinan dalam struktur organisasi sejak dulu sudah didominasi oleh laki-laki. Dalam PSI, walaupun belum memiliki divisi perempuan, namun keseriusannya terlihat dari dua orang perempuan yang berhasil menduduki kursi di lembaga legislatif.

Pada periode pra pemilihan, dukungan PDIP untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dapat terlihat dari proses rekrutmen yang menempatkan kaum perempuan pada nomor urut satu. Dukungan Partai Demokrat dapat terlihat dari proses rekrutmen yang mempermudah kaum perempuan untuk menjadi calon legislatif. Dukungan PSI dapat terlihat dari proses rekrutmen yang mengedepankan figur baru dalam artian calon tersebut sebelumnya bukan merupakan kader dari partai lain.

Pada periode pasca pemilihan, Bagi perempuan yang terpilih, PDIP bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Bali dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali, sedangkan bagi perempuan yang tidak terpilih akan lebih diprioritaskan ketika ada kegiatan partai

untuk mempengaruhi eksistensinya di masyarakat. Dukungan Partai Demokrat bagi perempuan terpilih dapat terlihat dari diberikannya pemahaman berupa pelatihan kepada kaum perempuan ketika bekerja sama dengan laki-laki, sedangkan bagi perempuan yang tidak terpilih, Demokrat bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Terakhir dukungan PSI untuk perempuan terpilih dapat terlihat dari diberikannya pembekalan secara rutin mengenai nilai yang diperjuangkan partai, sedangkan bagi perempuan yang tidak terpilih PSI melakukan pelatihan kepribadian.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, Albi., dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kantaprawira, Rusadi. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru
- Lovenduski, Joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan: Feminizing Politics*. Yogyakarta: Kanisius
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Marsh, David., dan Gerry Stoker. (2011). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (Theory and Methods in Political Science)*. Bandung: Nusa Media

- Moelong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murniati, A. Nunuk. P. (2004). *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*. Magelang: IndonesiaTera
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Tong, Rosemarie Putnam. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra
- _____. (2011). *Jurnal United Nations Development Programme mengenai Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat*. Diakses dari <https://www.ec-undp-electoralassistance.org/wp-content/uploads/2018/08/undp-content-publications-empowering-women-for-stronger-political-parties-Indonesian.pdf>, pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wita
- Aliyah dkk. (2018). *Jurnal Pembangunan Sosial Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Vol 1 No 2. Diakses dari <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/temali/article/download/3296/2083>, pada 1 Maret 2019 pukul 14.25 wita
- Ballington, Julie. (2011). *Jurnal United Nations Development Programme mengenai Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat*. Diakses dari <https://www.ec-undp-electoralassistance.org/wp-content/uploads/2018/08/undp-content-publications-empowering-women-for-stronger-political-parties-Indonesian.pdf>, pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wita
- Hardjaloka, Loura. (2012). *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia. Perspektif Regulasi dan Implementasi*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/109405-ID-potret-keterwakilan-perempuan-dalam-wajah.pdf>, pada 10 Juli 2019 pukul 08.35 wita

SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL ILMIAH

- Evaliani, Dwi Rosa. (2014). *Strategi Partai Politik dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi pada Partai PKS, PDIP dan NasDem Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Diakses dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=evaliani+dwi+rosa&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D2olzq8D-

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. *Partai Politik*. Pasal 13 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pasal 65 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. *Partai Politik*. Pasal 2 ayat 2 dan 5
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat*

Daerah. Pasal 8 ayat 1 bagian D

pada 2 November 2019 pukul 07.58 wita

WEBSITE

Data Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses dari <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/105/banyaknya-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-kota-dan-provinsi-bali.html>, pada 2 Mei 2019 pukul 20.32 wita

Website Resmi Partai Demokrat, diakses dari <https://www.demokrat.or.id>, pada 2 November 2019 pukul 09.30 wita

Webstite Resmi Partai Solidaritas Indonesia, diakses dari <https://www.psi.id>, pada 2 November 2019 pukul 11.25 wita

Detik News, *Perempuan Milenial Progresif*, diakses dari <https://m.detik.com/news/kolom/d-3835100/perempuan-milenial-progresif>, pada 11 Juni 2019 pukul 11.05 wita

Kanal Bali, *Partai Demokrat Bali Andalkan Caleg Perempuan*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/kanal-bali/partai-demokrat-bali-andalkan-caleg-perempuan-27431110790547588>, pada 11 Juni 2019 pukul 08.22 wita

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Press Release 17 Agenda Utama Perempuan dan Anak (Siaran Pers Nomor: B-002/Set/Rokum/MP01/1/2019)*, diakses dari <https://www.kemenpppa.co.id/index.php/page/read/29/2027/17-agenda-perempuan-dan-anak>, pada 10 Juli 2019 pukul 12.25 wita

Tirto.id, *Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv9g>, pada 10 Juli 2019 pukul 10.02 wita

Website Resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diakses dari <https://www.pdiperjuangan.id>,